

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEKUATAN MILITER SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN DI NEGARA-NEGARA KAWASAN ASIA TIMUR

Oleh
Andi Meganingratna
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Ilmu sosial
Universitas Fajar
Jalan. Prof. Abdurrahman Basalamah Makassar
ningratna07@gmail.com

ABSTRAK

Adanya berbagai dinamika dalam keamanan regional mendorong negara negara di kawasan Asia Timur untuk memperkuat strategi pertahanan untuk mengamankan kepentingan nasional. Potensi konflik antar negara mendorong pengembangan teknologi dan kekuatan militer sebagai pilihan bagi negara negara di kawasan Asia Timur untuk memperkuat powernya didalam interaksi hubungan antar negara. Akibatnya fenomena self defence menjadi semakin nyata terlihat diantara negara negara di kawasan Asia Timur. Studi ini menggunakan metode pendekatan realis yang menitik beratkan pada power sebagai tujuan utama suatu negara. Hasil studi ini memperlihatkan adanya kaitan yang sangat erat antara pengembangan teknologi dan kekuatan militer dengan power yang dimiliki oleh negara negara dikawasan Asia Timur. Adanya kepentingan nasional juga merubah strategi pertahanan yang sebelumnya diterapkan oleh negara negara tersebut.

Keywords: pengembangan teknologi, kekuatan militer, strategi pertahanan, asia timur

A. Pendahuluan

Semenjak berakhirnya perang dingin, sistem internasional berada pada posisi *negative peace* yang ditandai dengan keadaan damai namun memiliki potensi konflik yang tersembunyi. Konflik ini berasal dari berbagai ancaman baru dalam dinamika politik internasional yang rentan meningkat levelnya menjadi lebih besar. Kondisi ini yang menyebabkan masalah keamanan menjadi salah satu kajian yang paling serius dan mempengaruhi berbagai keputusan strategis secara global bahkan memunculkan fenomena *self defence* yang makin kuat antara masing-masing negara di dunia.

Asia Timur merupakan kawasan yang diwarnai dengan berbagai dinamika baik pada aspek ekonomi, politik, dan terutama keamanan. Terdiri dari beberapa negara; China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan yang masih diperdebatkan adalah Taiwan, dengan latar belakang sejarah konflik yang telah ada sejak ratusan tahun silam membuat kawasan ini sangat

peka terhadap gesekan kepentingan. Sebelum berakhirnya perang dingin, Kawasan Asia Timur merupakan salah satu arena persaingan *power* dan kepentingan diantara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Area persaingan mereka adalah Semenanjung Korea dan Laut Cina Timur. Seiring dengan melemahnya peran dua negara adidaya pasca Perang Dingin memberikan peluang munculnya multipolaritas dalam politik internasional di Asia Timur. Kebangkitan China, adanya perubahan dominasi Amerika Serikat serta revitalisasi yang dilakukan oleh Jepang merupakan ciri utama pergeseran kekuatan di kawasan Asia Timur. Perubahan ini akhirnya menjadi suatu kekuatan diplomatis untuk meningkatkan *bargaining* nya ketika negara-negara yang bersangkutan terlibat konflik dengan negara lain.

Keadaan ekonomi yang semakin meningkat pasca krisis ekonomi Asia tahun 1997 berefek pada munculnya kekuatan-kekuatan baru pada bidang militer (Stiglitz & Yusuf, 2001). Militer merupakan salah satu elemen paling penting dalam strategi pertahanan yang dimiliki oleh negara. Dengan kuantitas dan kualitas militer, sebuah negara dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan negara tersebut dalam usahanya mencapai kepentingan nasional. Seiring dengan kemajuan industrialisasi, terjadi pula pengembangan teknologi militer yang mempengaruhi peta kekuatan militer negara-negara di kawasan ini.

Berbagai studi telah memperlihatkan bahwa pengembangan teknologi militer menjadi poin penting di dalam strategi pertahanan. Bahkan bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, penempatan teknologi militer dijadikan sebagai titik awal transformasi pertahanan. Bagi Krepinevich, transformasi pertahanan didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengaplikasikan teknologi baru ke dalam sistem militer yang dikombinasikan dengan suatu konsep operasional and adaptasi organisasi yang inovatif sehingga merubah secara fundamental karakter dan metode konflik (Krepinevich, 1994).

Pemilikan sistem teknologi militer baru oleh negara-negara Asia Timur ini akan meningkatkan secara signifikan kapabilitas militer untuk melakukan peperangan. Menurut Widjajanto, negara-negara tersebut akan memiliki kemampuan persenjataan dengan daya hancur yang lebih mematikan, akurasi angkatan bersenjata dengan daya jangkauan lebih besar, system komando dan kontrol untuk memahami situasi medan tempur yang lebih efektif, serta kecepatan mobilitas operasional dan taktis yang lebih tinggi (Widjajanto, 2012). Tentu saja melihat kemampuan yang diperoleh dengan peningkatan teknologi militer ini, situasi di Asia Timur semakin tidak bisa diprediksi. Konflik yang sebelumnya telah cukup lama berhasil

diredam, bukan tidak mungkin kembali muncul di permukaan mengingat masing masing negara merasa memiliki kapabilitas militer yang paling hebat.

Studi ini akan meneliti bagaimana strategi pertahanan yang dikembangkan oleh negara negara di Asia Timur berkaitan dengan pengembangan teknologi dan kemampuan militernya. Pendekatan umum yang dikembangkan dalam studi ini adalah pendekatan realis. Sebuah pendekatan yang mengedepankan *power* sebagai tujuan utama penyelenggaraan suatu negara. Menurut pendekatan realis, aktor hubungan internasional yang paling berperan adalah negara. Keadaan dimana tidak ada kekuasaan tertinggi di atas negara disebut sebagai anarkhi. Prinsip anarkhi ini dipegang teguh oleh kaum realis sehingga mereka berpendapat bahwa yang paling menentukan posisi negara di ranah dunia internasional adalah negara itu sendiri. Bagaimana negara dapat memaksimalkan *power* yang dimilikinya untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut akan menentukan pertahanan negara tersebut di dalam sistem internasional (Donnelly, 2000).

B. Pendekatan Realis dalam Strategi Pertahanan Negara

Asia Timur yang memiliki luas sekitar 6.640.000 km² atau mendiami sekitar 15 persen dari keseluruhan wilayah benua Asia telah menjadi sebuah kawasan yang sangat dinamis. Berbagai isu keamanan memiliki peluang besar untuk berubah menjadi sumber konflik baru. Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan - yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan - sebagai kondisi tidak adanya ancaman yang berasal dari luar. Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional diidentifikasi sebagai “keamanan negara” - dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya - maka perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat (Keamanan Nasional Pertahanan Negara - koesnanto anggoro.pdf,” n.d.). Ketiga komponen ini membentuk kepentingan nasional yang merupakan tujuan dalam politik internasional.

Dengan asumsi bahwa keamanan nasional merupakan hal utama bagi suatu negara, maka yang paling diperlukan dalam hubungan ini adalah adanya *power*. Pendekatan realis memandang *power* sebagai tolak ukur utama dalam sistem internasional. Adalah suatu

keharusan bagi setiap negara untuk memiliki *power* yang substansial, karena hal ini merupakan cara untuk menjaga keberlangsungan *Balance of power*. Stabilitas dan keamanan dilihat sebagai fungsi keseimbangan kekuatan antar negara (Niou & Ordeshook, 1986). Dalam suatu sistem dimana tidak terdapat kekuasaan tertinggi karena negara dan prilakunya tidak dibatasi oleh institusional apapun dan tidak ada jaminan tentang kepastian keamanan maka ini menjadi alasan utama bagi tiap negara untuk memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, negara kemudian meningkatkan kekuatan militernya, juga membentuk aliansi maupun langkah strategis lainnya. Menurut Mearsheimer, peningkatan power merupakan strategi yang sangat bagus bagi suatu negara, utamanya untuk membentuk hegemony. Tujuannya bukan untuk mendominasi, tetapi lebih pada *survival* (Dunne, Kurki, & Smith, 2013).

Perang dan damai juga dipandang sebagai hasil hubungan internasional yaitu hubungan-hubungan strategis yang didasarkan atas kekuatan militer. Karena perang dan damai terbentuk sebagai hasil dari pola hubungan antar negara dalam sistem internasional, kekuatan militer menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan hubungan ini. Karena kekuatan militer merupakan unsur penting kekuatan negara dan hubungan Internasional, maka setiap peningkatan kemampuan militer dianggap memiliki potensi untuk mengancam dunia internasional. Kemampuan negara untuk melakukan perubahan teknologi dan organisasi sebenarnya ditujukan untuk kesiapan menghadapi peperangan. Adanya perspektif ancaman yang semakin bervariasi dan sulit terdeteksi menuntut negara-negara untuk mengembangkan kekuatan militernya untuk menyiapkan diri menghadapi hal tersebut. Negara yang memiliki teknologi tinggi diyakini dapat memenangkan setiap pertempuran karena ditunjang oleh kapabilitas teknologi dan kemampuan pengaturan strategi (Mallik, n.d.).

Namun peningkatan kekuatan militer suatu negara dapat menimbulkan dampak pada negara-negara lain di kawasan. Buzan menyebutkan bahwa penempatan instrumen militer oleh sebuah negara menimbulkan dua jenis ancaman: ancaman dari senjata itu sendiri dan ancaman dari kepemilikan senjata tersebut oleh aktor lain dalam sistem (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998). Strategi pertahanan yang dikembangkan pun kadangkala mengalami berbagai kontradiksi yang dikenal dengan istilah *Defence Dilemma*.

Situasi ini memberikan beberapa efek terhadap perilaku negara. Pertama, negara-negara cenderung untuk berada pada situasi khawatir tentang ancaman yang tidak masuk akal atau

bahkan terjebak dalam perlombaan senjata. Kedua, dalam hubungan antar negara, kepercayaan serta komitmen lebih diutamakan sebab ambiguitas justru dapat memancing konflik ketika bekerjasama (Szalai, 2009). Dengan adanya perubahan perilaku negara, maka strategi pertahanan yang dikembangkan oleh negara juga cenderung mengalami perubahan, karena kembali lagi pada kepentingan nasional negara sebagai tujuan politik internasional.

C. Pengembangan teknologi dan kekuatan militer di kawasan Asia Timur

Pertahanan negara merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Pada kondisi minimum, pertahanan berarti persiapan untuk tindakan-tindakan responsif yang dilakukan setelah serangan terjadi secara nyata (*clear attack*), yaitu ketika kekuatan militer sebuah negara bergerak maju berhadapan dengan kekuatan militer musuh yang telah melewati batas teritorial negara tersebut. Pada kondisi maksimum, pertahanan melibatkan persiapan yang bersifat lebih luas yang bertujuan mempersiapkan kekuatan militer untuk melakukan tindakan *pre-emptive*. Tindakan ini dirancang untuk menghadapi ancaman-ancaman yang diprediksi masih lama dan jauh secara geografis. Tindakan ini juga dirancang untuk memusnahkan semua sumber ancaman atau perlawanan yang signifikan. Negara-negara di kawasan Asia Timur juga telah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menggiatkan industri pertahanannya. Pengembangan ini diikuti dengan peningkatan anggaran pertahanan (“Berkat Sukses Ekonomi, Anggaran Militer Besar - JPNN.com,” n.d.).

Pada awal Maret 2015, China merilis anggaran pertahanan untuk tahun 2015. Hampir setiap tahun selama lebih dari dua dekade China meningkatkan pengeluarannya dengan persentase dua digit. Tahun 2015 anggaran pertahanan China naik 10,1 persen atau kira-kira sebesar USD145 milyar. Pada tahun 2014 China menghabiskan dana sekitar USD129,4 miliar (Rp16,8 triliun), setelah proposal peningkatan 12,2% disetujui pemerintah. Sebelumnya, peningkatan mencapai 10,7% (2013), 11,2% (2012), 12,7% (2011), dan 7,5% (2010). Artinya, peningkatan 10% menjadi peningkatan terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, China menjadi negara kedua di dunia yang paling besar mengeluarkan anggaran di bidang pertahanan setelah Amerika Serikat (AS) (“Anggaran Pertahanan China Naik 10%,” n.d.).

Jepang merupakan negara yang paling maju tingkat perekonomiannya dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Timur. Seperti halnya China, pada Januari 2015 pihak kabinet Jepang yang telah menyetujui anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 2015 yang mencakup jumlah sebesar USD 42,5 milyar (sekitar Rp. 535 triliun). Besaran anggaran tersebut tercatat mengalami peningkatan sebesar USD 800 juta (sekitar Rp. 10 triliun) dibanding anggaran pertahanan untuk tahun fiskal sebelumnya. Besaran belanja pertahanan Jepang untuk tahun fiskal 2015 tersebut juga tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Jepang (“Japan approves record 4.98 trillion yen defence budget,” n.d.). Peningkatan anggaran belanja Jepang tentu saja memicu reaksi yang keras dari China. Mengingat berbagai konflik yang ada diantara kedua negara ini, maka tidak heran pihak China menyatakan kekhawatirannya. Adanya trauma perang dunia serta sengketa sejarah dan teritorial dijadikan alasan oleh China untuk mengkritik anggaran pertahanan Jepang (“China Sorot Anggaran Pertahanan Jepang,” n.d.). Sejak 1945, Jepang hanya memiliki angkatan bersenjata yang bersifat pasif dan cuma diturunkan untuk misi damai. Namun menyusul konflik dengan Cina, Jepang memperkuat diri dengan membeli seluruh pesawat pengintai dan enam pesawat tempur siluman F-35 dari AS. Selain itu Jepang sejak 2013 memiliki kapal induk Izumo. Angkatan laut Jepang disebut sebagai yang paling canggih dan terlatih di Asia.

Korea Selatan bahkan telah mulai meningkatkan anggaran pertahanannya sejak tahun 2010 silam. Pada tahun 2010, anggaran pertahanan Korea Selatan naik sebesar enam persen menjadi USD 27,1 milyar, sekitar 10 persen dari anggaran negaranya secara keseluruhan (“Korea Selatan Ajukan Kenaikan Anggaran Pertahanan,” n.d.). Sejak tahun 2013, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah menetapkan jumlah anggaran pertahanan nasionalnya selama lima tahun kedepan dimana jumlahnya mencapai 215, 5 triliun Won. Terdapat peningkatan sebanyak 15 triliun Won dan rasio peningkatan rata-rata tahunan mencapai 7, 2 persen. Secara khusus, pihak Kementerian Pertahanan menganggarkan 9,6 triliun won untuk membangun sistem pertahanan rudal gaya Korea (“Militer - Anggaran Pertahanan Nasional Korsel Capai 214 triliun Won Hingga 5 tahun ke depan,” n.d.). Pada tahun 2014 anggaran pertahanan nasional Korea Selatan mencapai USD 34.4 miliar. Angka tersebut berada dibelakang Jerman sebesar 43.9 miliar. Peringkat ini diurutkan berdasarkan lima belas negara di dunia dengan anggaran pertahanan terbesar (“Korea Selatan Duduki Peringkat Ke-10 Negara Dengan Anggaran Militer Terbesar,” n.d.).

Korea Utara juga merupakan negara yang diyakini telah meningkatkan teknologi misil dan kemampuan senjata pemusnah massal. Anggaran pertahanan tahunan Korea Utara diperkirakan sebesar 4 sampai 7 miliar dolar. Angkatan bersenjata Korea Utara terdiri dari sekitar 1,1 juta personil siap tugas dan 4,7 juta cadangan. Ini membuat mereka memiliki kekuatan terbesar kelima di dunia menyangkut militer yang aktif. Korea Utara diperkirakan memiliki anggaran pertahanan tahunan sekitar USD 1,5 miliar (Rp 13,6 triliun) untuk mendukung kekuatan militer. Tetapi beberapa pihak menyebut pengeluaran aktual lebih dari tiga kali lebih tinggi, yaitu sekitar USD 5 miliar (Rp 45,5 triliun). Korea Utara telah menghabiskan 10,2 miliar Dollar untuk pertahanan nasional sesuai dengan perhitungan berdasarkan *purchasing power parity* (PPP) ("N. Korea's defense spending rises 16 pct over 5 yrs," n.d.).

Taiwan sebagai negara paling muda di Asia Timur juga telah mengembangkan kemampuan militernya meskipun masih jauh tertinggal dari negara lainnya. Dengan menggunakan strategi pertahanan *defensive*, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Taiwan bisa saja menjadi kekuatan baru di Asia Timur menyusul negara-negara besar lainnya. Konflik dengan China membuat Taiwan harus selalu meningkatkan kemampuan militernya. Taiwan saat ini telah mengembangkan kekuatan berdasarkan tekno-ekonomi dengan keunggulan di bidang elektronik dan semikonduktor yang merupakan hal penting dalam perang modern. Taiwan memiliki perusahaan TSMC yang merupakan salah satu dari tiga produsen semikonduktor yang paling maju di dunia bersama Intel dan Samsung. Taiwan juga telah memiliki sektor pembangkit nuklir. Dalam situs resminya pemerintah Taiwan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan negaranya dengan melakukan pembelian pesawat, sistem rudal dan C4ISR ("Defense Posture - Taiwan Government Entry Point," n.d.). Taiwan bahkan berencana menghabiskan 74,8 miliar dolar Taiwan atau USD 2,5 dalam sembilan tahun ke depan untuk meningkatkan sistem anti-rudal pertahanan udara guna menghadapi China ("Taiwan berencana belanjakan 2,5 miliar dolar untuk sistem anti-rudal," n.d.).

Tabel 1 kekuatan militer negara-negara Asia Timur tahun 2014

Negara	Naval Power	Air Power	Land System
China	853	7569	23669
Jepang	425	4015	4329

Korea Selatan	312	3574	12619
Korea Utara	1535	2400	17250
Taiwan	224	2125	8069

Sumber: diolah dari data dari www.globalfirepower.com

Tabel diatas memperlihatkan total dari peralatan militer yang dimiliki oleh negara di kawasan Asia Timur hingga tahun 2014. China memiliki total peralatan yang paling banyak di darat dan udara, meliputi *Main Battle Tanks*, *light tanks* dan *tank destroyers*. Sedangkan untuk kekuatan maritim Korea Utara memiliki total peralatan militer yang paling banyak. Kekuatan maritim Korea Utara inilah yang mendorong China dan Korea Selatan untuk mengembangkan kemampuan maritim baru yang mengarah kepada pembentukan *blue water navy* sedangkan Jepang sedang memperkuat industri galangan kapalnya untuk dapat memproduksi kapal induk (*aircraft carrier*) buatan domestik. China, Jepang, Korea Selatan, sudah memiliki pesawat tanker yang memungkinkan pengisian bahan bakar di udara. Hampir seluruh negara di Asia Timur telah memiliki pesawat tempur generasi IV seperti Su-27, Su-30, dan MiG-29 buatan Rusia, atau F-15, F-16, dan F/A-18 buatan Amerika Serikat, atau Mirage-2000 buatan Perancis. Pesawat tempur generasi IV ini memiliki persenjataan paling modern termasuk *radar-guided-air-to-air missile* varian AMRAAM atau AA-12. Sistem teknologi militer baru yang cenderung diadopsi oleh negara-negara Asia Timur juga ditujukan untuk memperkuat kemampuan C4ISR seperti pembelian pesawat berteknologi *airborne early warning and command* oleh Korea Selatan, atau sistem sensor laut Aegis oleh Korea Selatan dan Taiwan (widjajanto, 2012)

D. Prediksi, Dampak dan Penyelesaian Konflik

Tiap negara di dunia tentunya tidak ingin mendapat gangguan dari pihak lain, oleh sebab itu setiap negara akan senantiasa meningkatkan teknologi dan kekuatan militernya untuk pertahanan nasional. Kemunculan teknologi baru merupakan respon dari beberapa kegagalan atau kesalahan dari teknologi yang sudah ada. Perkembangan teknologi terencana sesuai dengan ditemukannya kegagalan dalam pengembangan teknologi yang sudah ada sehingga industri militer negara perlu memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi.

Selama ini, militer diidentikkan dengan kekerasan, pemaksaan, serta persenjataan. Sebagai salah satu instrumen kebijakan nasional, persenjataan memang memiliki karakter yang penting dibandingkan dengan peralatan teknik lainnya. Akan tetapi dewasa ini, penggunaan kekuatan militer tidak lagi dapat dipandang semata-mata hanya sebagai tindak kekerasan secara langsung. Sehingga yang patut dinilai dari persenjataan itu adalah tujuan senjata tertentu, bukan persenjataan itu sendiri. Besarnya kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara belum dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang dapat menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di dunia yang saat ini dapat dikatakan berada dalam era teknologi.

Dari hasil studi yang telah dikemukakan sebelumnya terlihat bahwa negara negara yang anggaran pertahanannya besar cenderung untuk memiliki kekuatan militer dengan teknologi yang lebih baik. Untuk negara di kawasan Asia Timur, dapat dilihat bahwa kekuatan militer masing masing negara memiliki jumlah yang hampir sama. Tetapi ada juga yang disebut dengan kekuatan nyata dan kekuatan yang tidak nyata dalam pengembangan teknologi dan kekuatan militer ini. Kekuatan nyata mencakup jumlah personil, peralatan perang serta sistem persenjataan baik itu senjata konvensional maupun senjata-senjata strategis. Sedangkan kekuatan militer yang tidak nyata meliputi kesiapsiagaan, latihan kepemimpinan, sikap moral, penampilan, kualitas, kemampuan beradaptasi, struktur organisasi dan sumber peralatan. Perbedaan kekuatan nyata dan tidak nyata inilah yang membedakan strategi pertahanan negara negara tersebut.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor yang membuat revolusi teknologi militer ini tidak berjalan maksimal. Pertama dana yang digunakan dalam usaha pertahanan suatu negara tidaklah sedikit, bahkan seringkali anggaran dan sumber daya yang dikerahkan untuk sektor pertahanan dapat mempengaruhi situasi ekonomi, politik, maupun lingkungan suatu negara; kedua, persiapan militer dalam rangka pertahanan sebuah negara seringkali dapat diartikan berbeda oleh negara lain sehingga usaha pertahanan tersebut membahayakan keamanan nasional negara yang bersangkutan. Masalah keamanan yang bersangkut dengan kemajuan teknologi justru dapat semakin menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran semua bangsa terhadap ancaman dari pemanfaatan teknologi dalam bidang militer yang bersifat destruktif.

Kekhawatiran utama yang muncul dari peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan dapat dilihat dari dua segi; pertama, dari segi kualitas, negara-negara di kawasan mampu memproduksi persenjataan berteknologi tinggi; kedua, dari segi kuantitas, negara-negara kawasan dapat memproduksi senjata secara massal. Kedua kemampuan tersebut dapat diimplementasikan dalam memproduksi persenjataan konvensional, seperti peningkatan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara pada kelima negara, maupun kekuatan militer non-konvensional, seperti pengembangan dan ujicoba senjata nuklir, rudal balistik, dan sistem pertahanan anti-rudal (Hamm, 2012).

Sebagai kawasan yang dinamis, Asia Timur sebenarnya masih memiliki keterikatan yang sangat besar dengan negara-negara besar yang sebelumnya menjadi payung keamanan kawasan ini. Berkurangnya peranan negara-negara besar ini membuat negara di kawasan Asia Timur berusaha mencari pola perlindungan sendiri. Berbagai ketidakpastian hubungan antar negara seperti masalah Korea, China –Taiwan, dan berbagai sengketa teritorial membuat negara-negara ini semakin mempersenjatai dirinya meskipun dengan resiko harus menggenjot semua sumber pendapatan negaranya untuk membiayai revolusi teknologinya.

Yang paling banyak memicu kekhawatiran sebenarnya adalah gerakan modernisasi dan pembangunan kekuatan militer China. Pemerintahan China sangat serius meningkatkan kekuatan militer mereka. Anggaran pertahanan yang terus meningkat setiap tahunnya membuat negara-negara lain di kawasan ini merasa cukup terganggu. Kebijakan pemerintah China untuk menaikkan anggaran pertahanannya tanpa adanya transparansi dari anggaran tersebut, telah menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan kecemasan sejumlah negara khususnya Jepang.

Meski demikian pemerintah China menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan yang normal, bersifat damai dengan tujuan melakukan modernisasi peralatan militer dalam negeri dan bukan untuk sesuatu yang bersifat *offensive*. China menyatakan bahwa negaranya sangat berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut China perlu untuk memperkuat basis pertahanannya sesuai dengan kondisi dunia internasional saat ini (Purwanto, 2010). Dalam buku putih pertahanan China disebutkan bahwa tujuan strategis nasional China adalah pembangunan sebuah negara sosialis modern yang makmur, kuat, demokratis, budaya maju dan harmonis. China memiliki tujuan untuk membentuk sebuah negara yang besar sehingga pengembangan kekuatan militer menjadi

salah satu poin penting dalam mewujudkan tujuan ini. Tanpa militer yang kuat, sebuah negara bisa tidak aman atau kuat (“II. Missions and Strategic Tasks of China’s Armed Forces,” n.d.).

Untuk strategi pertahanan pada masa yang akan datang, tampaknya China lebih memfokuskan negaranya pada pertahanan maritim. Pengembangan struktur pertahanan maritim menjadi tujuan yang disebutkan dalam buku putih pertahanannya (“II. Missions and Strategic Tasks of China’s Armed Forces,” n.d.) Anggaran pertahanan yang telah ditetapkan digunakan China untuk mengembangkan kemampuan militer berteknologi tinggi untuk membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi dan kemampuan tempur berbasis teknologi informasi.

Selain China, Jepang yang selama ini dikenal dengan penerapan strategi pertahanan *defensive* belakangan mulai mengejutkan dunia dengan rencana perubahan strategi pertahanannya. Pemerintah Jepang pada tahun 2014 melalui Kementerian Luar Negeri mulai mensosialisasikan perubahan kebijakan pertahanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe. Jepang ingin lebih berperan aktif dalam menjaga keamanan dunia dan meningkatkan kapasitas pertahanan mereka (“Jepang sosialisasikan perubahan kebijakan pertahanan PM Abe - ANTARA News,” n.d.). Konstalasi kekuatan global serta perkembangan ancaman baru membuat Jepang mempertimbangkan untuk mengubah konstitusi yang telah mereka jalankan pasca PD II. Sejauh ini kebijaksanaan keamanan Jepang dikoordinasikan bersama-sama dengan Amerika dalam suatu aliansi militer. Aliansi pada dasarnya, selain memberikan perlindungan keamanan terhadap Jepang, juga membaatsi kekuatan militer Jepang dan sekaligus memberikan jaminan bahwa Jepang tidak akan bertindak secara independen untuk melindungi kepentingannya di kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, peran regional Jepang sangat terbatas dan sebagian besar dirumuskan dalam bentuk peran ekonomi dan politik.

Selain mengembangkan kemampuan militer dalam negerinya, Korea Selatan juga sukses mengembangkan industri alutsista yang sukses diekspor, termasuk penjualan pesawat latih T-50IQ Golden Eagle. Korea Selatan juga intensif mengembangkan hubungan kerjasama pertahanan dengan berbagai negara di dunia. Jelas hal ini merupakan langkah cerdas untuk membangun koalisi pertahanan yang akan menguntungkan bagi Korea Selatan jika timbul konflik dengan negara negara lain di kawasan Asia Timur.

Munculnya kekuatan militer di Asia Timur juga menampilkan beberapa aktor nasional yang tadinya tidak ada maupun yang tidak diperhitungkan secara menonjol pada di masa lalu.

Korea bersatu, tentu saja belum ada namun hal ini sangat mungkin muncul secara bertahap meskipun dengan cara yang agak bergolak pada dasarwasa mendatang. Korea Utara secara bertahap akan menjadi klien raksasa bagi selatan, dan penyatuan melalui kehancuran dan absorsi *de facto* secara bertahap tetapi tidak terelakkan akan tiba. Perkembangan ini menggeser konfigurasi kekuatan secara krusial di Asia Timur Laut dan bertindak sebagai katalis penting bagi diplomasi keseimbangan kekuatan yang lebih aktif dan mungkin lebih menimbulkan konflik di kawasan tersebut (Calder, 1997).

Hal lainnya yang menjadi permasalahan di Asia Timur adalah kurangnya Energi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mencuat, kawasan ini sangat banyak mengkonsumsi sejumlah besar batubara dan gas alam. Tetapi bahan bakar tersebut sangatlah terbatas. Hal ini yang menyebabkan negara negara di Asia Timur berusaha memenuhi kebutuhan energinya dengan energi nuklir. Ini dapat dilihat dengan kapasitas energi nuklir yang dimiliki oleh negara-negara di Asia Timur sebesar 40 gigawatt antara tahun 1992 sampai dengan 2010 yang merupakan 48 persen dari total kapasitas nuklir-nuklir dunia.

Selain sebagai sumber energi, nuklir juga selalu dianggap berbahaya karena memiliki potensi penghancur yang masif dan memiliki bahaya yang tinggi juga terkait dengan penyebaran radiasi. Selain dianggap berbahaya, dapat dikatakan bahwa sulit bagi suatu negara untuk mengembangkan nuklir yang identik dengan kecanggihan teknologi senjata tersebut. Tidak semua negara mampu untuk mengembangkan nuklir baik untuk senjata maupun untuk sumber energi. Negara-negara di Asia Timur seringkali disebut-sebut sebagai negara-negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan nuklir. Hal ini disebabkan karena negara-negara di kawasan Asia Timur, dilihat dari kondisi domestiknya, memiliki kesempatan untuk mengembangkan nuklir. Sedikitnya ada tiga hal yang membuat suatu negara dianggap memiliki kesempatan untuk mengembangkan nuklir. Ketiga hal tersebut adalah penguasaan teknologi, peraturan tentang material nuklir, dan kapasitas ekonomi. Negara-negara di Asia Timur rata-rata setidaknya telah memiliki hal pertama dan kedua untuk dapat berkesempatan dalam pengembangan nuklir

Pengembangan nuklir inilah yang selalu menjadi masalah bagi Korea utara. Program ini dimulai pada tahun 1950 antara Korea Utara dan Uni Soviet dengan pembangunan reaktor di Yongbyon. Sejalan dengan berbagai perkembangan dalam keamanan internasional, alasan utama Korea Utara ingin memperkuat teknologi nuklirnya adalah karena menurut negara ini

kekuatan konvensional saja belum cukup (Nitikin, 2010) Program untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir Korea Utara ini tidak main-main, mereka bahkan telah menggelontorkan banyak dana untuk program pengembangan tersebut dan juga pada bidang militer.

Berbagai konflik lain yang terjadi di kawasan ini juga memiliki kemungkinan untuk menjadi besar. Klaim teritorial Cina dapat mengakibatkan perang regional jika klaim tersebut digugat secara konsisten. Kasus ini terjadi dengan Taiwan, yang diklaim oleh Cina dalam *undang-undang dasarnya* sebagai salah satu propinsi Republik Rakyat Tiongkok. Tanpa peperangan, sulit dibayangkan bagaimana klaim seperti ini bisa menjadi kenyataan. Cina tidak kompromi dalam hal ini dengan memperlakukan Taiwan sebagai negeri *Jiran* yang patut dihormati, atau bahkan sebagai bagian dari semacam persemakmuran Cina yang besar, Cina malah secara beruntun mengancam akan menyerang pulau tersebut.

Untuk merespon setiap kemampuan China dalam meningkatkan kekuatan pertahanannya, Taiwan meresponnya dengan menjalankan reformasi di bidang pertahanan. Salah satunya dengan menjalankan modernisasi militernya dan memperbesar akses dalam memiliki persenjataan yang canggih untuk menghadapi China, sebagaimana yang disampaikan Dennis V. Hickey dalam *Taiwan's Defense Reform*, yang ditulis Martin Edmonds dan Michael M. Tsai (Edmonds & Tsai, 2012). Tanpa melakukan reformasi di bidang pertahanan, sulit bagi Taiwan untuk menghadapi ancaman militer dari China.

Masalah utama dari keamanan Taiwan adalah fakta bahwa China yang merupakan ancaman terbesarnya berjarak sangat dekat dari wilayahnya, sementara AS yang merupakan sekutunya berjarak ribuan mil. Strategi efektif yang dapat dijalankan Taiwan adalah strategi pertahanan *defensive* (Cole, 2006). Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah aspek peningkatan kapasitas pertahanan maritim Taiwan sebagai negara pulau. Tanpa kekuatan laut yang memadai, sulit bagi Taiwan untuk mengatasi dilema keamanannya dalam menghadapi modernisasi angkatan laut China. Maritim merupakan syarat mutlak bagi tujuan nasional strategis bagi Taiwan dalam menjaga eksistensi, keamanan, dan pembangunannya.

Belum lagi konflik antara Jepang dan Korea Utara tentang Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yang melewati garis perbatasan dengan Jepang. Lalu pernyataan dari Korea Utara tentang Jepang yang terus mengikuti dan menuruti kebijakan Amerika dalam

mendukung dan membela pemakaian senjata pemusnah massal di Irak, juga dalam mengirimkan pasukannya ke Irak untuk membantu pasukan Amerika.

Kemudian konflik nuklir yang juga melibatkan Korea utara dan Korea Selatan. Pada tahun 2006, Korea utara dan Korea Selatan mengadakan dialog yang menghasilkan Sunshine policy. Kebijakan ini mampu mengurangi ketegangan di semenanjung Korea, namun kebijakan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2010 kebijakan ini berakhir dan membuat perubahan dalam hubungan antara kedua negara ini (“South Korea Formally Declares End to Sunshine Policy,” n.d.).

Selain itu terdapat beberapa situasi yang mempengaruhi proyeksi peningkatan kekuatan militer. Situasi ini misalnya : jika aliansi pertahanan Amerika-Jepang dipandang tidak lagi mampu memberikan jaminan keamanan pada Jepang, jika lingkungan strategis di sekitar Jepang berubah secara strategis misalnya dengan tidak selesainya masalah nuklir di semenanjung Korea, jika Cina semakin keras mengklaim kedaulatan atas Taiwan, Kepulauan Senkoku di Laut Cina Timur, dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan.

Banyak pengamat meramalkan bahwa situasi politik dan keamanan di berbagai kawasan akan ditandai dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Demikian pula dengan kawasan Asia Timur. Dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur ini turut mempengaruhi interkoneksi antar negara di kawasan ini sehingga menjadi lebih beragam. Apalagi dengan perkembangan teknologi militer sekarang ini yang semakin canggih. Persaingan di lingkungan militer menjadi suatu potensi yang kuat bagi perlombaan senjata dan konflik terbuka. Juga sengketa teritorial yang terus berlanjut di kawasan ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi suatu pertempuran militer.

Sekelumit konflik terus terjadi di Asia Timur dan kawasan ini akan terus memanas sampai pada akhirnya perang akan terjadi. Masa depan di Asia Timur akan suram dengan berbagai konflik yang terjadi. Bagaimanapun untuk memuncaknya suasana di Asia Timur Cina, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan akan terus membangun persenjataannya apabila perang terjadi. Mereka mencoba untuk mengembangkan lebih banyak lagi senjata di negara masing-masing dan menciptakan suatu kebijakan keamanan yang mengatur di Asia Timur. Namun terdapat keraguan bahwa kondisi-kondisi itu dapat menciptakan multi-lateral institusi yang stabil dan berbeda dari yang ada di Eropa, atau bahkan bisa lebih buruk. Ini dilihat

bahwa yang ada di Asia Timur adalah, suatu era yang dikarakteristikan dengan nasionalisme dan diplomasi kekuatan militer (“Friedberg.IS.93-94.pdf,” n.d.).

E. Simpulan

Dunia internasional kembali dikejutkan oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru di bidang militer pada negara-negara di Asia seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Korea Utara. Pertumbuhan pada Cina, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan dalam pengembangan senjata didorong oleh kepentingan ekonomis dan adanya anggaran persenjataan yang sangat besar pada masing masing negara. Setiap negara-negara di Asia Timur setiap tahunnya memberikan anggaran yang besar untuk pengembangan teknologi dan kekuatan militernya. Hal ini berarti setiap negara dengan sendirinya ‘dipaksa’ untuk selalu meng-*up grade* persenjataan mereka. Karena dengan ketidakmampuan untuk meng-*up grade* persenjataannya merupakan nilai kelemahan yang serius di bidang pertahanan dan keamanan dan ini dikhawatirkan tidak mampu secara potensial untuk menghadapi kekuatan militer dari negara/aktor lain yang mejadi ancaman potensial.

Selain pengembangan teknologi militer, negara negara di kawasan Asia Timur juga mengembangkan kekuatan militernya secara signifikan. Dewasa ini kekuatan militer tidak hanya digunakan untuk menghancurkan musuh secara langsung tetapi juga dipakai sebagai ancaman yang mendukung upaya tawar menawar dalam diplomasi. Adanya kekuatan militer tidak hanya untuk mengakibatkan kerusakan pada musuh namun kekuatan militer juga dapat digunakan sebagai ancaman untuk menopang perundingan dalam diplomasi atau sebagai alat untuk mengkomunikasikan maksud seseorang kepada musuh yang potensial. Dari pandangan di atas dapat terlihat bahwa di era pembangunan militer belakangan ini, kekuatan militer tidak saja dipergunakan untuk memulai perang dalam usaha memperoleh kepentingan nasional tetapi juga dapat digunakan untuk menjaga perdamaian dan dijadikan sebagai alat untuk menjalin suatu kerjasama.

Suatu kawasan yang aman dapat menciptakan hubungan yang baik antar negara yang berada di kawasan tersebut. Oleh karena itu keamanan regional menjadi hal yang sangat penting agar dapat mengeliminir kemungkinan konflik yang terjadi antar negara yang berada dalam satu kawasan. Salah satu konsekuensi berakhirnya persaingan Timur-Barat adalah munculnya ketegangan dan kecurigaan serta konflik-konflik regional. Bangkitnya kembali

militarisme Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara berusaha untuk mewujudkan unifikasi namun masih rawan konflik walaupun dalam skala yang kecil, Cina yang menganggap Taiwan sebagai ancaman terbesarnya, serta yang paling mengkhawatirkan banyak pihak ialah sengketa kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan merupakan sedikit contoh dari konflik konflik yang terjadi di kawasan ini. Juga adanya persaingan terbuka antara Jepang dan Cina sebagai pemimpin kawasan.

Seiring dengan semakin berkembangnya dunia internasional dewasa ini, masalah keamanan adalah sebuah persoalan yang sangat serius bahkan dapat memicu konflik maupun 'perang' diantara negara-negara internasional. Masalah keamanan yang bersangkutan paut dengan kemajuan teknologi dapat semakin menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran semua bangsa terhadap ancaman dari pemanfaatan teknologi dalam bidang militer yang bersifat destruktif. Adanya kepentingan nasional jangka panjang dari tiap-tiap negara, baik itu Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara membuat negara-negara di Asia Timur ini terus mengembangkan kekuatan militernya yaitu adanya pola pertahanan *Deterrence*.

Daftar pustaka

Buku

Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*.

Lynne Rienner Publishers.

Calder, K. E. (1997). *Asia's Deadly Triangle: How Arms, Energy, and Growth Threaten to*

Destabilize Asia-Pacific. Nicholas Brealey Pub.

Cole, B. (2006). *Taiwan's Security: History and Prospects*. Routledge.

Donnelly, J. (2000). *Realism and International Relations*. Cambridge University Press.

Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relations Theories*. OUP Oxford.

Edmonds, M., & Tsai, M. M. (2012). *Taiwan's Defense Reform*. Routledge.

Hamm, T.-Y. (2012). *Arming the Two Koreas: State, Capital and Military Power*. Routledge.

Nitikin, M. B. (2010). *North Korea's Nuclear Weapons: Technical Issues*. DIANE Publishing.

Stiglitz, J. E., & Yusuf, S. (2001). *Rethinking the East Asian Miracle*. World Bank Publications

artikel online

Anggaran Pertahanan China Naik 10%. (n.d.). Diambil 29 Agustus 2015, dari

<http://www.koran-sindo.com/read/972397/149/anggaran-pertahanan-china-naik-10-1425529402>

Berkat Sukses Ekonomi, Anggaran Militer Besar - JPNN.com. (n.d.). Diambil 21 Agustus

2015, dari <http://www.jpnn.com/read/2011/08/21/101267/Berkat-Sukses-Ekonomi,-Anggaran-Militer-Besar->

China Sorot Anggaran Pertahanan Jepang. (n.d.). Diambil 29 Agustus 2015, dari

<http://global.suarapemred.com/world/2015/01/15/43783/China-Sorot-Anggaran-Pertahanan-Jepang>

Defense Posture - Taiwan Government Entry Point. (n.d.). Diambil 1 September 2015, dari

<http://www.taiwan.gov.tw/ct.asp?xItem=103540&ctNode=1967&mp=1001>

Friedberg.IS.93-94.pdf. (n.d.). Diambil dari

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic199080.files/Readings_for_October_16_/Friedberg.IS.93-94.pdf

II. Missions and Strategic Tasks of China's Armed Forces. (n.d.). Diambil 30 Agustus 2015,

dari http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2015-05/26/content_4586708.htm

Japan approves record 4.98 trillion yen defence budget. (n.d.). Diambil 21 Agustus 2015, dari

<http://www.bbc.com/news/world-asia-30808685>

Jepang sosialisasikan perubahan kebijakan pertahanan PM Abe - ANTARA News. (n.d.).

Diambil 2 September 2015, dari <http://www.antaranews.com/berita/431873/jepang-sosialisasikan-perubahan-kebijakan-pertahanan-pm-abe>

Keamanan Nasional Pertahanan Negara - koesnanto anggoro.pdf. (n.d.). Diambil dari

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1\)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6\)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/1)%20Indonesia%20dan%20isu%20global/6)%20Food%20and%20Energy%20Security/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf)

Korea Selatan Duduki Peringkat Ke-10 Negara Dengan Anggaran Militer Terbesar. (n.d.).

Diambil 29 Agustus 2015, dari

<http://www.koreakini.com/read/2015/02/12/2423/Korea-Selatan-Duduki-Peringkat-Ke-10-Negara-Dengan-Anggaran-Militer-Terbesar->

Korea Selatan Ajukan Kenaikan Anggaran Pertahanan. (n.d.). Diambil 29 Agustus 2015, dari <http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-ajukan-kenaikan-anggaran-pertahanan-103960229/84251.html>

Mallik, A. (n.d.). Technology and Security in the 21st Century, A Demand-side Perspective. *SIPRI Research Report, No.20*. Diambil dari www.sipri.org

Militer - Anggaran Pertahanan Nasional Korsel Capai 214 triliun Won Hingga 5 tahun ke depan. (n.d.). Diambil 29 Agustus 2015, dari http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=12775&type=115#.VeI6OX02f3E

N. Korea's defense spending rises 16 pct over 5 yrs: Seoul ministry. (n.d.). Diambil 21 Agustus 2015, dari <http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/04/14/5/0301000000AEN20150414008500315F.html>

Purwanto, A. J. (2010). PENINGKATAN ANGGARAN MILITER CINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DI ASIA TIMUR. *SPEKTRUM*, 7(1). Diambil dari <http://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/495>

South Korea Formally Declares End to Sunshine Policy. (n.d.). Diambil 5 September 2015, dari <http://www.voanews.com/content/south-korea-formally-declares-end-to-sunshine-policy--108904544/130750.html>

Taiwan berencana belanjakan 2,5 miliar dolar untuk sistem anti-rudal. (n.d.). Diambil 1 September 2015, dari <http://www.antaraneews.com/berita/451071/taiwan-berencana-belanjakan-25-miliar-dolar-untuk-sistem-anti-rudal>

Jurnal

Krepinevich, A. F. (1994). Calvary to Computer: The Pattern of Military Revolutions. *The National Interest, Volume 37*

Niou, E. M. S., & Ordeshook, P. C. (1986). A Theory of the Balance of Power in International Systems. *Journal of Conflict Resolution, 30(4)*, 685–715.

Szalai, A. (2009). Coping with the Security Dilemma: A Fundamental Ambiguity of State Behaviour. *Skepsi, 2(2)*, 98–113.

Widjajanto, A. (2012). Revolusi Teknologi Militer Dan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal pertahanan, volume 2, nomor 2*.